

Dampak Kebijakan Moneter Tiongkok Terhadap ACFTA dan Integrasi Ekonomi Negara ASEAN

Muhammad Afi Syahrin¹, Ilham Ramadani², Mauana Maulid³

Abstract

ASEAN-China Free Trade Agreement or abbreviated (ACFTA) is the most influential economic integration agreement in the Southeast Asia region. This study aims to determine the impact of the ACFTA on ASEAN Economic Integration and Chinese monetary policy. ACFTA is the largest free trade area in the world in terms of population size and the third largest in terms of trade volume. The results of this study indicate that China's monetary policy in 2013-2014 negatively affected trade in the ACFTA Region due to deficits in the trade balance of Indonesia, Malaysia and Thailand to China, which caused a decline in overall ACFTA economic growth in 2015. The study also showed a relationship between the conditions of China's domestic economy, American hegemony in the East and Southeast Asia Region through the Trans-Pacific Partnership and China's efforts to include Yuan in the IMF's Special Drawing Rights basket, with China's monetary policy strategy. To achieve the objectives referred to above, the research method that I use is the type of research. Descriptive-Analytic. The data collection technique used by the author is library. The author analyzes the data using qualitative analysis techniques supported by quantitative data, and for discussion of the problem the author uses deductive writing techniques.

Keywords:

Tiongkok; Indonesia; Malaysia; Thailand; Monetary Policy; PBOC; ACFTA; International Trade.

Abstrak

ASEAN-China Free Trade Agreement atau yang disingkat (ACFTA) merupakan perjanjian integrasi ekonomi yang paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ACFTA terhadap Integrasi Ekonomi Negara ASEAN dan kebijakan moneter Tiongkok. ACFTA menjadi kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia dalam ukuran jumlah penduduk dan ketiga terbesar dalam ukuran volume perdagangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter Tiongkok pada tahun 2013-2014 berpengaruh negatif terhadap perdagangan di Kawasan ACFTA akibat defisit pada neraca perdagangan Indonesia, Malaysia dan Thailand terhadap Tiongkok, yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi ACFTA secara keseluruhan pada tahun 2015. Penelitian ini juga menunjukkan hubungan antara kondisi ekonomi domestik Tiongkok, hegemoni Amerika di Kawasan Asia Timur dan Tenggara melalui Trans-Pacific Partnership dan upaya Tiongkok untuk memasukkan Yuan ke dalam keranjang Special Drawing Rights IMF, dengan strategi kebijakan moneter Tiongkok. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud di atas, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian. Deskriptif-Analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah keperpustakaan. Penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif, dan untuk pembahasan masalah penulis menggunakan teknik penulisan deduktif.

Kata Kunci:

Tiongkok; Indonesia; Malaysia; Thailand; Kebijakan Moneter; PBOC; ACFTA; Perdagangan Internasional.

¹ Universitas Muhammadiyah Malang.

² Universitas Muhammadiyah Malang. Email: Dndhani@gmail.com.

³ Universitas Muhammadiyah Malang.

A. Pendahuluan

Kawasan Asia Tenggara belakangan ini terdapat fenomena ekonomi politik yang sangat terasa. Negara Asia Tenggara memperkuat integrasi ekonomi baik pada level bilateral, regional maupun ekstra-regional. Asia Tenggara memiliki organisasi regional yaitu ASEAN, ASEAN telah menandatangani berbagai perjanjian perdagangan bebas di dalam dan di luar kawasan melalui berbagai perjanjian seperti *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA), *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) dan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership* (FTA), *ASEAN-Australia-New Zealand FTA* (AANZFTA) (KEMENLU RI Kerjasama Ekonomi ASEAN). Pada Desember 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) telah berlaku secara resmi. Integrasi ekonomi seperti yang terjadi saat sekarang menunjukkan terjalannya hubungan internasional yang baik antara negara-negara yang terlibat dalam perjanjian integrasi ekonomi tersebut. Dengan kata lain, perjanjian ekonomi menuntut terdapatnya situasi politik yang kondusif di tempat dimana perjanjian tersebut diterapkan.

Tujuan dari integrasi ekonomi yaitu untuk mencapai kepentingan ekonomi kawasan, salah satunya melalui diberlakukannya *Free Trade Area*. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Salvatore menurutnya, integrasi ekonomi adalah suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi atau bahkan menghapus hambatan-hambatan perdagangan hanya kepada para negara anggota kesepakatan (Dominick Salvatore, 1997). Sehingga menyebabkan terjadinya

peningkatan aktivitas perdagangan antara Negara anggota secara berkelanjutan yang pada akhirnya menciptakan pasar tunggal dimana masing-masing Negara saling berkompetisi. Adanya pasar tunggal akibat adanya integrasi ekonomi ini mengakibatkan kebijakan ekonomi di suatu Negara dapat berpengaruh signifikan terhadap kondisi ekonomi di Negara lainnya yang terikat oleh perjanjian integrasi ekonomi yang sama.

Salah satu perjanjian integrasi ekonomi yang tertua dan paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara yaitu ACFTA. ACFTA tidak hanya mencakup perdagangan barang dan jasa, tapi juga investasi dan berbagai bentuk kerjasama ekonomi lainnya. Setelah ACFTA disepakati oleh Negara anggotanya dan mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2010, AFCTA menjadi kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia dalam ukuran jumlah penduduk dan ketiga terbesar dalam ukuran volume perdagangan.

AFTA yang dibentuk oleh Tiongkok ini yang saat itu Tiongkok memiliki ambisi menggantikan dominasi Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang sebagai mitra dagang utama ASEAN. Setelah terjadinya insiden *Tiananment Square* pada tahun 1989, menyebabkan ekonomi Tiongkok mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga menjadi ancaman serius bagi Amerika Serikat yang pada saat itu melancarkan politik pembendungan di Beijing. Keinginan Tiongkok untuk melakukan ekspansi pasar bukan hanya disasari oleh kepentingan geopolitik saja, tetapi Tiongkok juga mengharapkan keuntungan ekonomi dari harga bahan mentah yang murah serta

produk pertanian ASEAN. Kedua hal tersebut yang membuat Tiongkok memiliki kepentingan ekonomi politik yang besar di Kawasan ASEAN.

ACFTA telah banyak berpengaruh terhadap ekonomi domestik Negara anggota ASEAN. Misalnya Singapura muncul sebagai negara industrialisasi baru bersamaan dengan Korea, Taiwan dan Hongkong, sementara Malaysia, Thailand dan Indonesia telah berubah dari ekonomi pertanian yang stagnan menjadi ekonomi manufaktur yang dinamis melalui pertumbuhan yang berkelanjutan dan industrialisasi. Belakangan ini, Negara ASEAN lainnya seperti Vietnam juga mulai memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat dan konsisten. Dengan pertumbuhan ekonomi kawasan yang mengesankan selama tiga dekade, ASEAN banyak dilihat sebagai contoh Negara berkembang lainnya sebagai model pembangunan ekonomi yang berhasil (The Prospect of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), 2019).

Keuntungan integrasi ekonomi dengan Tiongkok yang dirasakan oleh ASEAN saat ini diikuti dengan semakin rentannya ASEAN terhadap pengaruh kebijakan ekonomi domestik Tiongkok khususnya dalam bidang Moneter. Pemerintah Tiongkok melalui Bank Rakyat Tiongkok (PBOC), dapat mengeluarkan kebijakan moneter yang hanya berdasarkan pada kepentingan nasionalnya namun memiliki dampak terhadap ekonomi kawasan ASEAN secara keseluruhan.

Selama beberapa decade terakhir, PBOC banyak mengambil kebijakan moneter yang dianggap kontroversial, bahkan bagi penduduk Tiongkok sendiri.

Salah satunya ketika PBOC kembali mendevalusi Reminmi sebanyak 1,85% terhadap dollar Amerika Serikat dan 2,2% terhadap Euro pada perdagangan Selasa 8 November 2015 sebagai usaha untuk melepaskan diri dari krisis dan meningkatkan nilai ekspor Tiongkok dengan drastik (Market Bisnis, 2019)

Hal ini dianggap bertolak belakang dengan usaha Tiongkok untuk mengubah reputasi internasionalnya sebagai pemain nakal menjadi kekuatan ekonomi yang bertanggung jawab, khususnya mengingat bahwa Yuan akan secara resmi dimasukkan ke dalam keranjang SDR Dana Moneter Internasional pada oktober 2016, bersama dengan Euro, Dollar, Yen dan Pound Sterling (IMF, 2019).

Di lain sisi, pertumbuhan ekonomi Tiongkok juga tidak dapat dilepaskan dari peran dan kontribusi Bank Rakyat Cina, khususnya dalam memformulasikan kebijakan moneter Tiongkok. Pencapaian yang diperoleh Bank Rakyat Cina merupakan buah dari serangkaian reformasi finansial serta lebih terbukanya Tiongkok setelah menjadi anggota *World Trade Organization (WTO)* pada tahun 2001. Bank Rakyat Cina secara independen menjalankan fungsi sebagai Bank Sentral pada tanggal 1 Januari 1984, yang menandai diterapkannya kebijakan moneter modern serta masuknya peraturan makro ekonomi pemerintah Tiongkok ke dalam tahapan sejarah yang baru.

Kebijakan moneter Bank Sentral Tiongkok tidak hanya mempengaruhi ekonomi domestik Tiongkok, tapi juga berdampak pada perdagangan internasional di Kawasan ACFTA, yang dengan demikian juga berdampak pada ekonomi domestik negara dalam perjanjian

tersebut. Indonesia, Malaysia dan Thailand tercatat sebagai tiga Negara ASEAN dengan jumlah ekspor-impor terbanyak dengan Tiongkok pada tahun 2012-2013 (China Statistical YearBook. 2013). Ketiga Negara yang berada pada satu perjanjian pasar bebas dengan Tiongkok (ACFTA) ini tentunya tidak semata-mata diuntungkan dengan kebijakan moneter Tiongkok, khususnya berkaitan dengan devaluasi Yuan. Turunnya nilai Yuan terhadap mata uang lain seperti Dollar Amerika dan Euro secara sistematis mengakibatkan Tiongkok dapat meningkatkan jumlah ekspor dan sekaligus mengurangi jumlah impornya. Ekspor Tiongkok dapat meningkat dengan harga komoditas yang menjadi lebih kompetitif di Negara lain, sementara impor Tiongkok menurun akibat daya beli penduduk Tiongkok yang akan terus tergerus, kedua hal tersebut disebabkan oleh rendahnya nilai tukar Yuan terhadap mata uang lainnya.

Melihat fenomena ini, penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian terhadap Dampak ACFTA terhadap integrasi ekonomi negara ASEAN serta kebijakan moneter Tiongkok.

B. Pembahasan

PBOC banyak mengeluarkan kebijakan moneter yang bersifat ekstrim dan dianggap berbahaya, karena pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melambat. Sejak Juni 2015, PBOC tercatat telah menyuntikkan dana sebanyak 1,8 trilliun yuan untuk menunjang ekonomi Tiongkok yang melambat melalui campuran fasilitas likuiditas yang telah ditargetkan. Suntikan dana oleh PBOC tersebut setara dengan *quantitative easing*

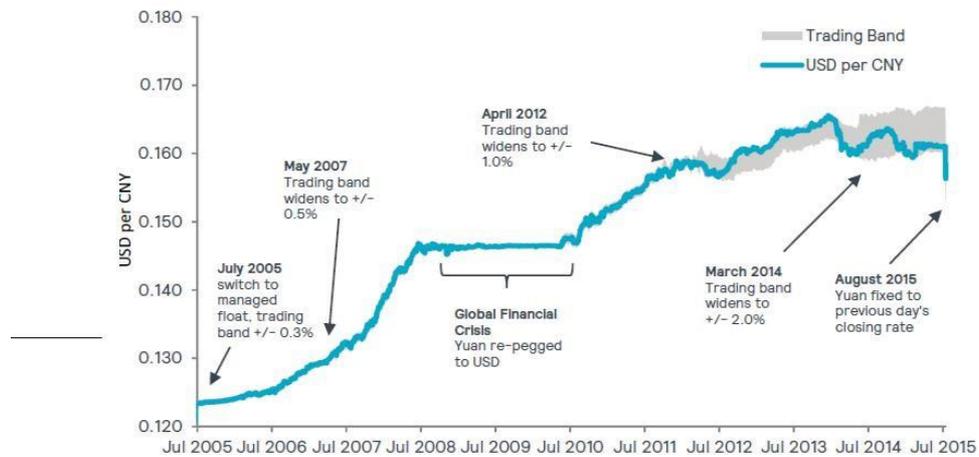
selama lebih dari tiga bulan pada program pembelian sekuritas The Fed (The People's Bank of China, 2019)

PBOC mengumumkan perubahan pada pengaturan patokan harian Yuan, pada 11 Agustus 2015. Dalam istilah praktis, kebijakan baru ini mewakili liberalisasi rezim valuta asing, yang sesuai dengan keinginan pemerintah Tiongkok untuk menjadikan Yuan sebagai mata uang internasional. Pada rezim sebelumnya, Yuan dikontrol dengan ketat, menjadikannya sebagai mata utama dunia dengan tingkat guncangan yang paling rendah. Langkah baru untuk menerapkan rezim mengambang secara alami membawa lebih banyak guncangan dan kemungkinan pergerakan harian yang lebih besar, sesuai dengan pesaing Yuan pada tingkat global.

Yuan pernah dipatok dengan Dollar Amerika sampai Juli 2005, saat rezim mengambang teratur "*managed float*" mulai diperkenalkan. Pada tahun-tahun berikutnya, jangkauan dagang meluas secara perlahan; dari $-/+ 0,3$ persen pada akhir 2005, menjadi $-/+ 2$ persen pada maret 2014 dan seterusnya (hanya terganggu oleh pematokan ulang sementara selama krisis finansial besar-besaran). Dalam kerangka yang terbaru, PBOC akan menentukan *reference rate* harian setiap pagi, dan Yuan boleh diperdagangkan selama setiap hari dalam jangkauan $-/+ 2$ persen. *Reference rate* ditentukan oleh PBOC, tapi akhir-akhir ini harga nilai tukar pasar (*market spot price*) terkadang memiliki perbedaan yang signifikan dengan patokan resmi Reference Rate Adalah sebuah patokan (benchmark) suku bunga yang dijadikan

dasar oleh floating rate security (Sekuritas bunga-mengambang, 2019).

Grafik Sejarah Kebijakan Nilai Tukar Tiongkok

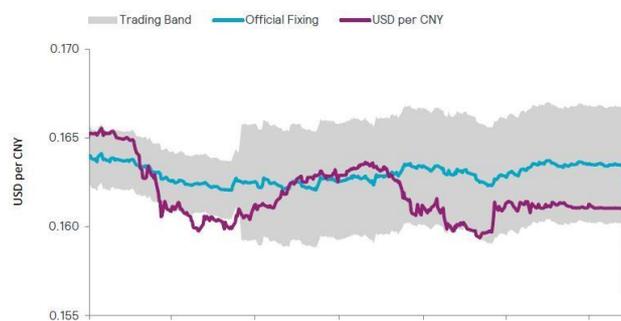


Sumber : Bloomberg, Chinese Exchange Rate in 2005-2015

Pada pengaturan yang baru yang mulai diterapkan pada awal Agustus 2015, *reference rate* ditentukan berdasarkan harga tutup hari sebelumnya, sementara jangkauan dangannya tetap pada ± 2 persen. Pengaturan baru ini pada awalnya menyebabkan penurunan Yuan sebanyak 1,9 persen (penurunan harian terbesar pada penerapan pengaturan sebelumnya tahun 2005), karena Yuan telah ditutup di hari sebelumnya dekat dengan jangkauan

bawah yang dibolehkan. Walaupun menurut PBOC, keputusan tersebut hanya dilakukan sekali saja “*one-off move*” untuk menciptakan keseimbangan antara *reference rate* dan *market spot price*, bank dipaksa untuk menentukan *reference rate* hari selanjutnya pada bagian bawah jangkauan dangang (dari nilai bagian bawah baru), menyebabkan devaluasi yang lebih lanjut yaitu sebanyak 1,6 persen.

Grafik Devaluasi Yuan



Sumber : Bloomberg, Chinese Yuan Devaluation

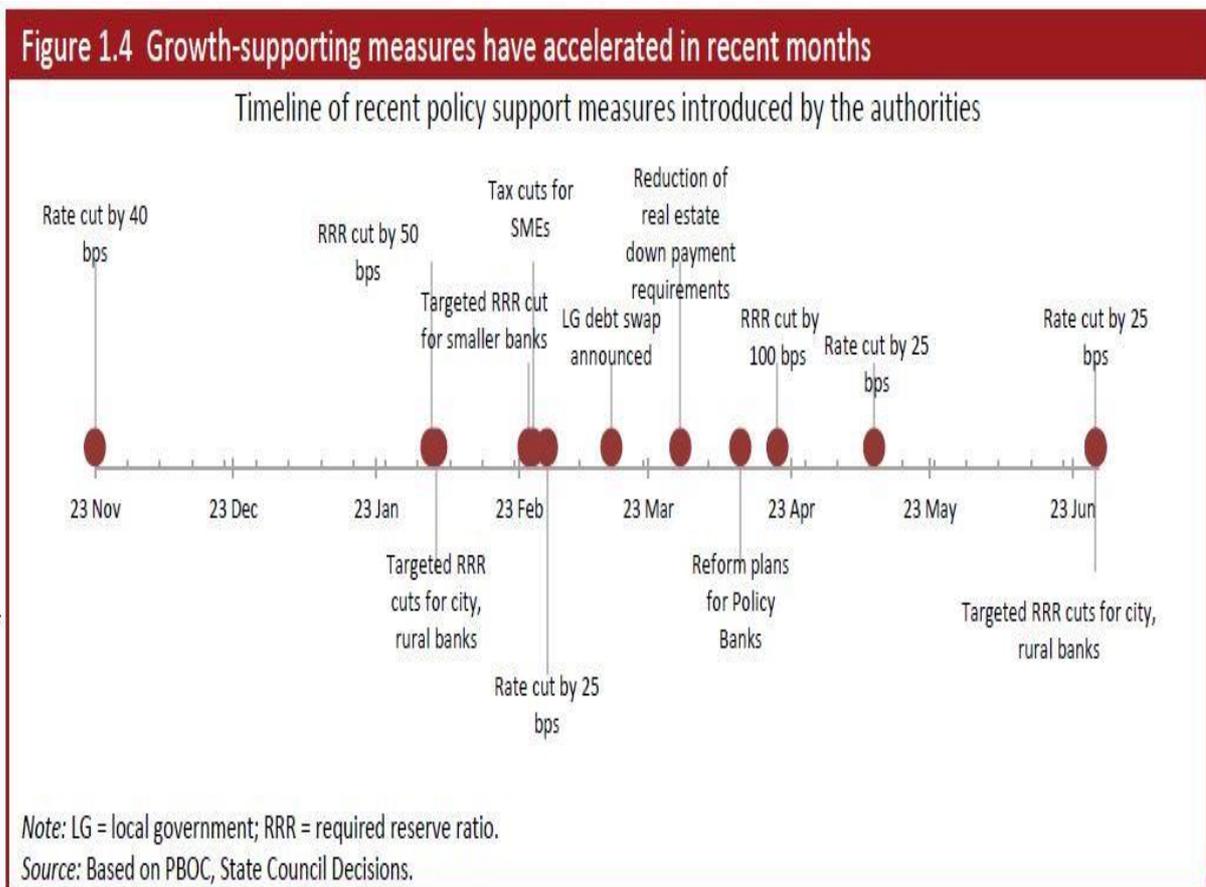
Selain melakukan perubahan pada rezim valuta asingnya (dari yang dipatok menjadi mengambang), PBOC juga

menggunakan instrumen moneter yang lain untuk menanggapi kondisi ekonomi domestiknya. PBOC dengan sengaja

memilih cara yang rumit untuk mengurangi persyaratan moneter (pada dasarnya menyediakan uang jangka tengah (*medium term money*) yang lebih murah untuk beberapa bank, dan tidak kepada bank lainnya. Hal ini digunakan sebagai benteng pertahanan pertama pemerintah

Tiongkok. Di tempat yang lain, bank sentral memotong suku bunga sampai hampir nol sebelum beralih ke kebijakan yang tidak biasa. Di Tiongkok tingkat bunga pinjaman adalah 6% (Sekuritas bunga-mengambang, 2019).

Gambar 1. Target Utama Ekonomi Makro PBOC



Sumber : DBS Group Research

Pemerintah Tiongkok berfokus pada peningkatan permintaan jangka pendek sementara mengizinkan penyesuaian struktural ke arah model ekonomi yang berkelanjutan, dukungan kebijakan telah menjadi lebih intensif dan lebih banyak diterapkan dengan menggunakan instrumen konvensional seperti pelonggaran kebijakan dan dukungan fiskal untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya, untuk memberikan dukungan pada aktivitas diantara regulasi yang makin ketat pada pinjaman antar bank dan pinjaman bank agen. PBOC terus melonggarkan kebijakan moneter, menurunkan deposit patokan dan tingkat pinjaman, mebuat target pemotongan pada rasio cadangan wajib. Usaha untuk mengurangi hambatan administratif juga terus diupayakan (Economics, China : Recalibrating Monetary Policy, DBS Group Research 2015).

Karena investasi publik merupakan salah satu alat untuk menstabilisasi pertumbuhan, penyeimbangan dalam negeri dari ketergantungan yang besar pada investasi bergerak pada tingkatan yang terukur. Pertumbuhan investasi aset tetap (ukuran yang luas yang juga meliputi penjualan tanah dan pembelian modal yang telah dipakai) menurun ke 15,2 persen pada tahun 2014, dari 19,4 persen pada tahun 2013. Pada quarter pertama tahun 2015, pertumbuhan investasi semakin melambat menjadi 13,5 persen. Beberapa dari faktor diatas (kelebihan kapasitas pada industri berat utama, pengetatan kebijakan pada sektor dengan penggunaan energi yang intensif, merosotnya penjualan dan pembangunan real estate, regulasi mengekang pada bank bayangan) telah menahan investasi swasta.

Pada waktu yang sama, investasi publik menguat. Pada quarter pertama tahun 2015, investasi pada infrastruktur tercatat sebagai pertumbuhan saham terbesar pada investasi saham tetap, mengalahkan kontribusi sektor manufaktur.

Intervensi kebijakan PBOC banyak berfokus pada penemuan sumber pendanaan baru. Selain menganjurkan kerja sama pemerintah- swasta "*public-private partnerships*" sebagai model pendanaan pembangunan infrastruktur baru, telah ada banyak usaha untuk memaksimalkan kegunaan kebijakan. Selanjutnya pada April 2015, Dewan Negara memperluas kegunaan dana keamanan sosial untuk membeli sekuritas pemerintah lokal serta instrumen finansial lainnya. Peraturan baru membolehkan untuk berinvestasi sampai 20 persen dari portofolionya pada utang pemerintah lokal dan sekuritas perusahaan. (sebelumnya, dana yang boleh diinvestasikan sampai 10 persen dari portofolionya pada pinjaman trust, tapi tidak ada pada utang pemerintah lokal). Pada bulan Mei 2015, Dewan Negara mewacanakan untuk melanjutkan penyediaan bantuan finansial terhadap pendanaan pemerintah lokal untuk pembangunan projek lokal yang sementara berlangsung (Economics, China : Recalibrating Monetary Policy, DBS Group Research 2015).

Pada Februari 17 2016, RMB secara keseluruhan telah turun sebanyak 4,9 persen terhadap USD, sejak 11 Agustus 2015 (hari dimana Tiongkok memulai prosedur baru untuk menurunkan nilai tukarnya). Pemerintah Tiongkok telah melakukan intervensi untuk mendukung RMB dan arus keluar modal yang terbatas. Dengan nilai surplus yang diperkirakan

mencapai 350 miliar USD pada tahun 2016, atau kurang lebih sebanyak 3 persen dari PDB Tiongkok, dan cadangan uang sebanyak 3,2 triliun, Tiongkok memiliki sumber daya cadangan uang asing yang sangat besar untuk mendukung RMB. Akan tetapi perlambatan pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus berlanjut, kemungkinan untuk melakukan devaluasi sepihak (mematok harga RMB) atau menggunakan harga pasar (*floating currency*), tidak dapat dengan cepat ditolak (George R Hoguet, 2007).

Secara historis, PBOC telah menargetkan jumlah uang dari pada harga uang itu sendiri. Contohnya, sampai baru-baru ini, deposit bank komersil dan tingkat pinjaman di Tiongkok tidak ditentukan dengan bebas tapi diwajibkan oleh pemerintah. Represi finansial tersebut menghasilkan biaya modal yang sengaja ditekan, yang selanjutnya menghasilkan malinvestment di proyek yang umumnya dapat menguntungkan. Selain itu, pemerintah juga telah (dan masih berlanjut) memberikan kredit pada usaha yang diinginkannya.

Walaupun belum sepenuhnya dilaksanakan, Tiongkok kini telah meliberalisasi deposit dan tingkat utangnya dan bergerak ke arah rezim yang menargetkan “harga uang”, seperti yang dilakukan oleh The Fed pada saat dia mengubah *The Fed Fund Rate*.

C. Kesimpulan

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok sejak tahun 2005 sampai sekarang merupakan kebijakan moneter ekspansif. Strategi kebijakan moneter Tiongkok dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Pada tingkat domestik, Tiongkok mendevaluasi Yuan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahunan pemerintah dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor (guna menghasilkan surplus pada neraca perdagangan Tiongkok). Sementara pada tingkat global, Tiongkok mengganti rezim nilai tukar terpatok menjadi mengambang sebagai langkah untuk memasukkan Yuan kedalam keranjang SDR IMF dan membendung hegemoni Amerika Serikat di Asia Timur dan Tenggara, khususnya pada pakta perdagangan Trans-Pacific Partnership. Walaupun kedua faktor internal dan eksternal terlihat saling bertentangan (dengan digunakannya Yuan sebagai mata uang cadangan IMF, pemerintah Tiongkok melalui PBOC akan mengalami kesulitan dalam melakukan intervensi seperti yang sementara dilakukan saat ini), namun melalui penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Tiongkok menganut *dual monetary policy objectives* dalam menerapkan kebijakan moneternya. Dengan kata lain, Tiongkok masih melakukan intervensi dalam menentukan jangkauan dangang valutenya (rezim mengambang teratur) di pasar valuta asing, namun kedepannya Tiongkok ingin agar Yuan digunakan sebagai alat transaksi pada operasi IMF dan perdagangan internasional dimana harga nilai tukar Yuan akan ditentukan berdasarkan mekanisme pasar (*market-spot price*). *Dual monetary policy objective* dilakukan untuk mengingngat inflasi, suku bunga dan tingkat pengangguran berfluktuasi sepanjang waktu mengikuti situasi ekonomi dan finansial dunia. Oleh karena itu, kebijakan moneter di suatu negara harus mencerminkan kondisi ekonomi sementara

negara tersebut serta kondisi ekonomi yang diharapkan kedepannya (economic outlook). Devaluasi Yuan mencerminkan kondisi ekonomi Tiongkok yang melemah akibat turunnya harga komoditas minyak dunia, sementara transisi perlahan-lahan rezim valuta asing Tiongkok dari yang tetap menjadi mengambang merupakan indikasi tujuan ekonomi jangka panjang Tiongkok sebagai salah satu negara yang paling berpengaruh dalam perdagangan internasional.

Dampak negatif kebijakan moneter Tiongkok terhadap ekspor-impor, pasar stok dan pasar valuta asing di Kawasan ACFTA, khususnya terhadap Indonesia, Malaysia dan Thailand. Ekspor Tiongkok ke Indonesia, Malaysia dan Thailand mengalami peningkatan sementara impor dari ketiga negara tersebut ke Tiongkok mengalami penurunan. Tiongkok merupakan pasar ekspor terbesar bagi Indonesia, Malaysia, Thailand dan begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, kebijakan moneter di Tiongkok dapat berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi ketiga negara tersebut serta perdagangan internasional di Kawasan ACFTA secara keseluruhan. Penemuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam periode beberapa tahun terakhir (khususnya semenjak rentetan devaluasi yuan yang dimulai pada tahun, Tiongkok telah banyak mengorbankan kepentingan ekonomi kawasan perdagangan yang dia motori (ACFTA), demi mencapai kepentingan ekonomi domestiknya. Hal ini tentunya berpengaruh kepada leverage Tiongkok kedepannya di ASEAN, sementara ini Tiongkok dianggap sering mewakili kepentingan ekonomi bersama

negara-negara ASEAN yang mayoritasnya merupakan negara berkembang.

Daftar Pustaka

Buku:

Anderson, B. (1983). *Imagined Communities*. London: Verso.

Buku kumpulan artikel:

Saukah, A. & Waseso, M.G. (Eds)/ 2002. *Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah* (Edisi ke-4, cetakan ke-1). Malang: UM Press

Artikel dalam buku kumpulan artikel:

Curran, J. (1991). Rethinking the Media as a Public Sphere 4.

Artikel dalam jurnal atau majalah:

Haryanto, Ignatius. (2008). Industri media membesar, bagus untuk bisnis, tapi untuk demokrasi?. *Jurnal Sosial Demokrasi*. Vol. 3 No. 1 Edisi Juli-September.

Artikel dalam Koran:

Pramono, Sidik. 12 Desember 2011. Menagih Hanji (De)sentralisasi. *Kompas*, hlm. 6.

Tulisan/berita dalam Koran (tanpa nama pengarang):

Kompas. 8 Desember, 2011. Pemilihan Pimpinan KPK: Antara Pakta Integritas dan Independensi, hlm. 3.

Dokumen resmi:

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1978. *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*. Jakarta:

Depdikbud. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 1990. Jakarta: PT. Armas Duta Jaya.

Buku terjemahan:

Hennessy, Bernard. (1989). *Pendapat Umum*. Edisi keempat, terjemahan Amiruddin Nasution. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:

Dhakidae, D. (1991). *The State, The Rise of Capital and the fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesia News Industry*. Disertasi PhD tidak diterbitkan, Ithaca, New York: Cornell University.

Suwannathat-Pian, K. (2004, 5-7 Februari). *Question of Identity of the Muslims in Southern Thailand, A Comparative Examination of Responses of the Sam-Sams in Satun and of the Thai Malay Muslim in the Three Provinces of Yala, Narathiwat, and Pattani to Thailand's Quest for National Identity*. Paper presented at the A Plural Peninsula: Historical Interaction among the Thai, Malays, Chinese and Others, Nakhon Si Thammarat.

Internet (karya individual):

Clancy, Robert. (2011). *Ethics of Democracy*. (Online). (http://www.cooperativeindividualism.org/clancy-robert_ethics-of-democracy.html, diakses 14 februari 2019).

Internet (artikel dalam jurnal online):

Kuncoro, Mudrajad. (2011). The Global Economic Crisis and Its Impact on Indonesia's Education. *Journal of Indonesian Economy and Business (Online)*, Volume 26, No.1, 2011 (<http://jebi.feb.ugm.ac.id/>).

Internet (bahan diskusi):

Wilson, D. 20 November 2005. Summary of Citing Internet Sites. *NETTRAIN Discussion List*. (Online), (NETRAIN@ubvm.cc.buffalo.ed.).